

# Profil Data Terpilah Gender

## Sektor Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkayang

### Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai kondisi data terpilah berdasarkan gender di sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkayang. Analisis ini didasarkan pada data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang 2021-2026, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta sumber relevan lainnya.

Temuan utama laporan ini mengidentifikasi adanya sebuah "paradoks invisibilitas": perempuan merupakan aktor ekonomi yang signifikan, terutama di sektor UMKM informal dan sebagai anggota koperasi, namun partisipasi dan kontribusi mereka tidak tercermin secara memadai dalam data statistik resmi dan dokumen perencanaan strategis daerah. Kesenjangan data gender ini menjadi hambatan fundamental dalam perumusan kebijakan yang inklusif dan efektif. Laporan ini menyoroti disparitas tajam dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan, ketiadaan data kepemilikan UMKM oleh perempuan, serta fragmentasi program pemberdayaan ekonomi perempuan yang tersebar di antara berbagai dinas tanpa sinergi yang terukur.

Sebagai respons atas temuan tersebut, laporan ini merekomendasikan pendekatan strategis tiga cabang. Pertama, institusionalisasi pengumpulan, analisis, dan pelaporan data terpilah gender oleh BPS Kabupaten Bengkayang dan dinas-dinas terkait, terutama Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kedua, perancangan program intervensi yang spesifik gender, berfokus pada upaya "UMKM Naik Kelas" bagi usaha milik perempuan dan program afirmatif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kelembagaan koperasi. Ketiga, pembentukan mekanisme koordinasi antar-dinas untuk mensinergikan program dan anggaran pemberdayaan ekonomi perempuan, mengatasi tumpang tindih dan meningkatkan efektivitas kebijakan.

---

## Bagian 1: Konteks Sosio-Ekonomi dan Demografi Kabupaten Bengkayang

### 1.1 Profil Geografis dan Administratif

Kabupaten Bengkayang, yang dibentuk melalui pemekaran dari Kabupaten Sambas berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, menempati posisi geografis yang strategis di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan luas wilayah mencapai 5.396,30 km<sup>2</sup>, atau sekitar 3,68% dari total luas Kalimantan Barat, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia, menjadikannya salah satu beranda depan negara. Secara administratif, wilayahnya terbagi menjadi 17 kecamatan, 2 kelurahan, dan 122 desa. Kondisi alamnya yang beragam, mencakup pesisir pantai di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan hingga daratan dan perbukitan di sebagian besar kecamatan lainnya, memberikan potensi ekonomi yang signifikan di sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan pertambangan.

## **1.2 Demografi dan Kependudukan Berbasis Gender**

Berdasarkan data populasi terbaru, jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang pada akhir tahun 2024 mencapai 298.979 jiwa. Salah satu karakteristik demografi yang paling menonjol adalah rasio jenis kelamin yang tidak seimbang. Data tahun 2023 menunjukkan rasio jenis kelamin sebesar 108, yang berarti terdapat 108 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Angka ini bukan sekadar statistik kependudukan, melainkan sebuah indikator yang mencerminkan struktur sosial-ekonomi daerah. Rasio yang lebih tinggi pada populasi laki-laki mengindikasikan kemungkinan adanya pola migrasi tenaga kerja, di mana laki-laki, baik dari dalam maupun luar daerah, tertarik untuk bekerja di sektor-sektor padat karya yang dominan di Bengkayang, seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Konsekuensinya, perempuan seringkali memikul beban ganda yang lebih berat. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi subsisten dan informal di tingkat desa, sementara laki-laki lebih banyak terserap di sektor formal atau semi-formal. Implikasinya, setiap program pemberdayaan ekonomi harus dirancang dengan memahami peran krusial perempuan sebagai pengelola ekonomi domestik dan lokal, bukan sekadar sebagai "pencari nafkah tambahan".

## **1.3 Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan**

Kondisi ekonomi Kabupaten Bengkayang sangat bergantung pada sektor primer. Hasil Pencatatan Potensi Desa (Podes) 2024 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di 118 dari 124 desa/kelurahan bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, tingkat kesejahteraan masih menjadi tantangan. Data BPS pada tahun 2023 mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Bengkayang berada pada level 6,03%. Angka ini menjadi latar belakang penting dalam memahami urgensi program-program pemberdayaan ekonomi yang efektif dan tepat sasaran.

## **1.4 Analisis Pembangunan Manusia dan Kesetaraan Gender**

Analisis terhadap dokumen RPJMD 2021-2026 menunjukkan gambaran yang kompleks terkait pembangunan manusia dan kesetaraan gender. Di satu sisi, Kabupaten Bengkayang menunjukkan capaian yang baik dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), yang

mencapai 71,96 pada tahun 2020 dan menempati peringkat kedua di Kalimantan Barat. Capaian ini salah satunya didorong oleh tingginya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, yang mencapai 51,9% pada tahun 2020.

Namun, capaian IPG yang tinggi ini dapat menutupi kesenjangan yang lebih dalam di ranah sosial dan ekonomi. Tingginya partisipasi perempuan di sektor publik tidak secara otomatis mencerminkan akses dan kontrol yang setara atas sumber daya ekonomi. Terdapat kontradiksi antara tingginya IPG dengan indikator lain seperti Angka Melek Huruf (AMH), di mana perempuan (90,36% pada 2020) masih tertinggal dari laki-laki (96,34% pada 2020). Kesenjangan ini menandakan adanya "jurang pemberdayaan" (

*empowerment gap*), di mana perempuan mungkin telah memiliki representasi politik yang memadai, namun belum tentu memiliki kekuatan ekonomi yang setara. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan tidak boleh hanya berpuas diri dengan capaian IPG, tetapi harus secara spesifik menargetkan pemberdayaan ekonomi untuk menerjemahkan partisipasi politik menjadi kesejahteraan ekonomi yang nyata dan merata.

**Tabel 1. Indikator Kunci Demografi dan Ekonomi Kabupaten Bengkayang (2020-2023)**

Indikator	Nilai	Tahun Data	Sumber
Total Populasi	298.979 jiwa	2024	
Rasio Jenis Kelamin	108	2023	
Tingkat Kemiskinan	6,03%	2023	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,53	2023	
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	71,96	2020	
Angka Melek Huruf (Laki-laki)	96,34%	2020	
Angka Melek Huruf (Perempuan)	90,36%	2020	

## Bagian 2: Profil Gender di Pasar Tenaga Kerja

### 2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Data ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkayang menyoroti adanya kesenjangan partisipasi yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data RPJMD 2021-2026, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 menunjukkan disparitas yang tajam: TPAK laki-laki mencapai 87,24%, sementara TPAK perempuan hanya 63,29%. Kesenjangan partisipasi sebesar 24% ini merupakan indikator kuat adanya "ekonomi bayangan" (

*shadow economy*) yang tidak terhitung dalam statistik formal, di mana perempuan menjadi pelaku utamanya. Angka TPAK yang rendah bagi perempuan bukan berarti mereka tidak bekerja; sebaliknya, ini menunjukkan bahwa pekerjaan mereka—di sektor usaha rumahan,

pertanian subsisten, dan pekerjaan domestik tak berbayar—tidak diakui atau diukur oleh sistem pendataan ketenagakerjaan formal.

Fenomena ini mengimplikasikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan yang hanya berfokus pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)—yang ditargetkan turun dari 3,61% menjadi 3,05% pada 2026—akan gagal menysasar segmen ekonomi terbesar yang digerakkan oleh perempuan. Arah kebijakan perlu bergeser dari sekadar "menciptakan lapangan kerja" formal menjadi "mengakui, mendukung, dan memformalkan pekerjaan yang sudah ada" yang mayoritas dilakukan oleh perempuan.

## 2.2 Distribusi Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor dan Jenis Kelamin

Ketersediaan data terpilah gender yang merinci distribusi tenaga kerja berdasarkan sektor ekonomi di tingkat Kabupaten Bengkayang masih menjadi tantangan. Dokumen-dokumen yang dianalisis tidak menyajikan data ini secara langsung. Namun, publikasi BPS "Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka" diketahui memuat tabel mengenai penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin, yang mengindikasikan bahwa data tersebut semestinya dapat diturunkan ke level kabupaten.

Sebagai proksi, tren nasional dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dapat memberikan gambaran. Data Sakernas secara konsisten menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan cenderung terkonsentrasi di sektor perdagangan dan jasa, sementara laki-laki mendominasi sektor produksi, operator, dan pekerja kasar. Pola ini kemungkinan besar juga terjadi di Bengkayang, di mana perempuan banyak terlibat dalam perdagangan skala kecil dan usaha jasa, sementara laki-laki bekerja di sektor perkebunan, pertambangan, dan konstruksi.

## 2.3 Upah dan Kondisi Kerja

Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun 2025 sebesar Rp 3.062.260. Namun, penetapan UMK ini seringkali tidak berdampak langsung pada pekerja perempuan. Dominasi perempuan di sektor informal—seperti pedagang kecil, pengrajin, atau pekerja di usaha rumahan—membuat mereka sangat rentan tidak menerima upah sesuai standar UMK. Selain itu, status pekerjaan informal juga menempatkan mereka di luar jangkauan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja, sebuah isu yang juga menjadi perhatian dalam dokumen RPJMD.

**Tabel 2. Indikator Angkatan Kerja Berdasarkan Gender, Kabupaten Bengkayang (Data 2020)**

Indikator	Laki-laki	Perempuan	Kesenjangan (Gap)	Sumber
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	87,24%	63,29%	23,95%	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,61% (Agregat)	3,61% (Agregat)	Data Terpilah Tidak Tersedia	

---

## Bagian 3: Analisis Sektor Koperasi Berbasis Gender

### 3.1 Kondisi Umum dan Kinerja Sektor Koperasi

Sektor koperasi di Kabupaten Bengkayang menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Berdasarkan data, terdapat total 189 unit koperasi, dengan 125 di antaranya (sekitar 66,1%) berstatus aktif. Kinerja pemerintah daerah dalam membina sektor ini tercatat positif. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 menunjukkan bahwa realisasi indikator "Persentase koperasi aktif" mencapai 57,00%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 44,98%. Hal ini menandakan keberhasilan program pemerintah dalam melakukan pembinaan dan reaktivasi koperasi di daerah.

### 3.2 Partisipasi Gender dalam Keanggotaan Koperasi

Meskipun program reaktivasi koperasi menunjukkan keberhasilan, muncul pertanyaan krusial: siapa yang paling diuntungkan dari program ini? Sayangnya, data terpilah gender untuk keanggotaan koperasi di tingkat Kabupaten Bengkayang tidak tersedia dalam dokumen-dokumen resmi yang dianalisis. Ketiadaan data ini menciptakan "titik buta" dalam evaluasi kebijakan.

Untuk mendapatkan gambaran, data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat dapat digunakan sebagai proksi atau benchmark. Di tingkat provinsi, komposisi keanggotaan koperasi menunjukkan dominasi laki-laki, dengan proporsi 63% pria dan 37% wanita. Jika diasumsikan pola serupa terjadi di Bengkayang, maka keberhasilan program reaktivasi koperasi berpotensi lebih banyak menguntungkan laki-laki. Tanpa adanya data terpilah dan target yang spesifik gender, sebuah program yang secara angka terlihat berhasil justru dapat secara tidak sengaja memperlebar kesenjangan partisipasi yang sudah ada. Keberhasilan program menjadi "buta gender", karena tidak mampu mengukur apakah manfaatnya terdistribusi secara adil antara laki-laki dan perempuan.

### 3.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Koperasi Wanita

Meskipun data spesifik mengenai "Koperasi Wanita" di Bengkayang tidak ditemukan, potensi pengembangannya sangat terbuka. Program-program pemberdayaan perempuan yang dijalankan oleh dinas lain, seperti Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA), dapat disinergikan untuk mendorong pembentukan dan penguatan koperasi berbasis perempuan. Tantangan utama yang dihadapi, sebagaimana diidentifikasi dalam LAKIP, adalah rendahnya pemahaman terhadap regulasi dan belum optimalnya pengawasan kelembagaan. Tantangan ini tentu juga berlaku bagi pengembangan koperasi wanita, yang memerlukan pendampingan intensif dalam aspek manajerial, keuangan, dan tata kelola.

**Tabel 3. Status dan Kinerja Koperasi di Kabupaten Bengkayang (2022-2023)**

Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Estimasi Partisipasi Gender (Berdasarkan Data Prov.)	Sumber
Jumlah Koperasi Total	-	189 unit	-	
Jumlah Koperasi Aktif	-	125 unit	-	
Persentase Koperasi Aktif	44,98%	57,00%	-	
Jumlah Anggota (Pria - Est.)	-	-	63%	
Jumlah Anggota (Wanita - Est.)	-	-	37%	

## Bagian 4: Profil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berbasis Gender

### 4.1 Lanskap UMKM di Kabupaten Bengkayang

Sektor UMKM merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bengkayang. Data terbaru dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2023 mencatat terdapat 19.631 unit UMKM di Bengkayang, menunjukkan pertumbuhan pesat dari 5.305 unit pada tahun 2020. Struktur UMKM ini sangat didominasi oleh usaha skala mikro. Dari total UMKM yang ada, 92,62% adalah Usaha Mikro, 6,19% adalah Usaha Kecil, dan hanya 1,20% yang masuk dalam kategori Usaha Menengah. Struktur piramida yang sangat curam ini mengindikasikan adanya tantangan besar bagi para pelaku usaha untuk dapat "naik kelas".

### 4.2 Peran Perempuan dalam Sektor UMKM

Meskipun data kuantitatif yang secara spesifik menghitung jumlah kepemilikan UMKM oleh perempuan di Bengkayang tidak tersedia, berbagai sumber kualitatif secara konsisten menunjukkan peran dominan perempuan di sektor ini. Kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan dinas seringkali menyoar ibu-ibu dan kelompok perempuan yang aktif dalam usaha *home industry*, kuliner, dan kerajinan. Di daerah perbatasan seperti Kecamatan Jagoi Babang, di mana jumlah penduduk perempuan hampir setara dengan laki-laki, perempuan menjadi penggerak utama UMKM lokal berbasis kearifan lokal, seperti produk anyaman bidai. Peran ini menegaskan posisi perempuan sebagai fondasi dari ekonomi mikro di tingkat komunitas.

### 4.3 Analisis Kinerja Pemerintah dan "Jebakan Skala Mikro"

Analisis kinerja pemerintah daerah menunjukkan adanya sebuah tantangan kritis. LAKIP tahun 2022 melaporkan kegagalan total (capaian 0%) dalam mencapai target penambahan

"Jumlah Usaha Menengah". Kegagalan kebijakan ini, jika dihubungkan dengan struktur UMKM yang ada, secara tidak proporsional berdampak pada pengusaha perempuan.

Kombinasi antara dominasi perempuan di level usaha mikro dan kegagalan pemerintah dalam memfasilitasi program peningkatan skala usaha menciptakan sebuah "jebakan skala mikro" (*micro-scale trap*). Para pengusaha perempuan, yang menjadi mayoritas di level terbawah piramida ekonomi, terhambat untuk berkembang. Kebijakan yang ada belum efektif membantu mereka mengatasi hambatan permodalan, akses pasar, dan peningkatan kapasitas manajerial yang diperlukan untuk naik dari skala mikro ke kecil, apalagi menengah. Akibatnya, mereka tetap berada dalam siklus usaha dengan profitabilitas rendah, keberlanjutan yang rapuh, dan kontribusi ekonomi yang belum optimal, meskipun jumlah mereka sangat besar.

**Tabel 4. Profil UMKM di Kabupaten Bengkulu Berdasarkan Skala Usaha (2023)**

Skala Usaha	Jumlah Unit	Persentase (%)	Sumber
Usaha Mikro	18.184	92,62%	
Usaha Kecil	1.215	6,19%	
Usaha Menengah	236	1,20%	
<b>Total</b>	<b>19.635</b>	<b>100%</b>	

*Catatan: Terdapat selisih 4 unit dari total yang disebutkan (19.631) dalam sumber, kemungkinan karena pembulatan.*

---

## Bagian 5: Kerangka Kebijakan, Program, dan Kelembagaan Pemerintah

### 5.1 Analisis RPJMD 2021-2026 dari Perspektif Gender

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu 2021-2026 menjadi dokumen acuan utama pembangunan daerah. Misi 3, 4, dan 5 secara langsung menyentuh isu pemberdayaan ekonomi, koperasi, dan UMKM. Namun, evaluasi kritis terhadap dokumen ini menunjukkan bahwa sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan bersifat "buta gender". Indikator seperti 'persentase koperasi aktif', 'jumlah usaha menengah', dan 'tingkat pengangguran terbuka' disajikan dalam bentuk angka agregat tanpa pemilahan berdasarkan jenis kelamin. Akibatnya, keberhasilan pencapaian target-target ini tidak dapat mengukur apakah manfaat pembangunan telah terdistribusi secara adil dan merata antara laki-laki dan perempuan.

## 5.2 Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan perangkat daerah yang memiliki mandat utama dalam pembinaan sektor-sektor ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati. Analisis LAKIP 2022 menunjukkan kinerja yang beragam. Di satu sisi, dinas ini berhasil melampaui target dalam program reaktivasi koperasi. Namun di sisi lain, dinas ini mencatat kegagalan signifikan dalam program peningkatan skala usaha menengah. Kinerja yang timpang ini menunjukkan perlunya evaluasi internal untuk menyeimbangkan fokus program, dari sekadar kuantitas (jumlah koperasi aktif) menjadi kualitas dan pertumbuhan (skala usaha).

## 5.3 Fragmentasi Kelembagaan dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Salah satu temuan penting dari analisis ini adalah adanya fragmentasi kelembagaan dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi perempuan. Meskipun mandat utama pembinaan UMKM dan Koperasi berada di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, program-program yang secara eksplisit menasar perempuan justru tersebar di dinas lain. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) memiliki program spesifik "Pemberdayaan Perempuan Bidang... Ekonomi". Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) juga aktif menyelenggarakan bimbingan teknis UMKM yang pesertanya mayoritas perempuan.

Tidak ada indikasi adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur antar ketiga dinas ini dalam dokumen yang tersedia. Kondisi ini menciptakan "efek silo" kelembagaan, di mana program berisiko tumpang tindih, penggunaan sumber daya menjadi tidak efisien, dan data tidak terintegrasi. Seorang pengusaha perempuan yang ingin mendapatkan dukungan penuh mungkin harus berinteraksi dengan tiga dinas yang berbeda, menghadapi birokrasi yang terpisah-pisah. Efektivitas program pemberdayaan ekonomi perempuan pada akhirnya terhambat bukan karena ketiadaan program, melainkan karena fragmentasi dan lemahnya koordinasi kelembagaan.

**Tabel 5. Ringkasan Target dan Indikator RPJMD 2021-2026 Terkait Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (2020)	Target Akhir (2026)	Catatan Keterpilahan Gender	Sumber
<b>Meningkatkan ekonomi kerakyatan</b>	Persentase koperasi aktif (%)	-	47,02%	Tidak Ada	
	Jumlah Usaha Menengah (unit)	-	29 unit	Tidak Ada	
<b>Memperluas Lapangan Pekerjaan</b>	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,61%	3,05%	Tidak Ada	
	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,46%	5,62%	Tidak Ada	

---

## Bagian 6: Sintesis dan Rekomendasi Strategis

### 6.1 Sintesis Temuan Kunci: Paradoks Invisibilitas Ekonomi Perempuan

Analisis komprehensif terhadap data yang tersedia menyingkap sebuah paradoks fundamental di Kabupaten Bengkayang: perempuan adalah fondasi ekonomi kerakyatan, namun fondasi ini sebagian besar tidak terlihat (*invisible*) dalam data dan perencanaan strategis. Kesenjangan TPAK yang besar, konsentrasi perempuan di sektor UMKM skala mikro yang tidak terdata secara spesifik, partisipasi minoritas dalam kelembagaan koperasi, serta fragmentasi program pemerintah, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Kontribusi ekonomi perempuan sangat signifikan di tingkat akar rumput, namun tidak terukur, tidak diakui secara formal, dan akibatnya tidak didukung secara strategis oleh kerangka kebijakan yang ada. Tanpa data yang akurat, kebijakan yang dirancang akan terus gagal mengatasi hambatan struktural yang dihadapi perempuan, seperti "jebakan skala mikro" dan akses terbatas terhadap sumber daya produktif.

### 6.2 Rekomendasi untuk Penguatan Data dan Monitoring

Untuk mengatasi masalah fundamental ini, diperlukan langkah-langkah konkret dalam perbaikan sistem data:

1. **Untuk BPS dan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi:** Sangat direkomendasikan untuk mewajibkan penambahan kolom 'jenis kelamin pemilik/pengelola' dalam semua kegiatan pendataan UMKM dan keanggotaan koperasi. Data ini harus menjadi variabel standar dalam publikasi seperti "Kabupaten Bengkayang Dalam Angka".
2. **Untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA):** Merekomendasikan agar penyusunan LAKIP dan dokumen evaluasi pembangunan lainnya di masa depan wajib menyajikan analisis capaian kinerja yang terpilah berdasarkan gender, terutama untuk program-program ekonomi.

### 6.3 Rekomendasi untuk Intervensi Kebijakan dan Program

Kebijakan dan program harus dirancang ulang untuk secara eksplisit menargetkan pemberdayaan ekonomi perempuan:

1. **Program "UMKM Perempuan Naik Kelas":** Merancang program akselerasi yang secara spesifik menargetkan usaha mikro milik perempuan. Program ini harus fokus pada tiga pilar: (a) akses permodalan yang mudah, (b) pelatihan manajemen bisnis dan literasi digital, dan (c) fasilitasi akses pasar yang lebih luas untuk mengatasi "jebakan skala mikro".
2. **Program Afirmatif Koperasi:** Menetapkan target spesifik untuk meningkatkan persentase anggota dan pengurus perempuan dalam koperasi-koperasi yang ada, terutama yang menerima bantuan atau program revitalisasi dari pemerintah.

3. **Integrasi Gender dalam RPJMD Berikutnya:** Mendorong agar proses penyusunan RPJMD di masa depan memasukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terpilah gender untuk semua sasaran di sektor ekonomi, sebagai komitmen politik untuk pembangunan yang inklusif.

#### 6.4 Rekomendasi untuk Penguatan Kelembagaan

Untuk mengatasi "efek silo" dan meningkatkan efektivitas program, diperlukan penguatan koordinasi:

1. **Membentuk Gugus Tugas Pemberdayaan Ekonomi Perempuan:** Mengusulkan pembentukan sebuah forum atau gugus tugas lintas-dinas yang permanen, melibatkan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinsos PPA; Disperindag; dan BAPPERIDA. Gugus tugas ini berfungsi untuk mensinkronkan perencanaan program, integrasi data, dan alokasi anggaran, memastikan bahwa semua upaya pemberdayaan ekonomi perempuan berjalan sinergis dan tidak tumpang tindih.